

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan menjadi hambatan berbagai negara di dunia, sehingga membutuhkan perhatian yang serius. Kemiskinan pada dasarnya mengacu pada keterbatasan dalam mewujudkan hak dasar dan kebutuhan hidup yang layak, diantaranya makanan, air bersih, fasilitas sanitasi yang memadai, layanan kesehatan, perumahan, pendidikan, serta mengakses informasi, yang tidak hanya bergantung pada tingkat pendapatan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengakses layanan sosial (Bappenas, 2022). Indonesia telah bergabung dalam 193 negara yang menyetujui 17 target *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang mengkaji pemberantasan kemiskinan sebagai *goals* pertama.

Pada tahun 2023 Indonesia menduduki posisi ke enam sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tinggi di Asia Tenggara dengan persentase kemiskinan mencapai 9,36% atau sekitar 25,90 juta penduduk (UNDP, 2023). Mengutip data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2023), tercatat persentase penduduk miskin di perkotaan bulan Maret 2023 mencapai 7,29%. Dilain hal, bulan Maret 2023 di pedesaan sebesar 12,22 persen. Jumlah penduduk miskin di perkotaan mencapai 11,74 juta jiwa pada bulan Maret 2023, dan di pedesaan mencapai 14,16 juta jiwa di bulan Maret 2023. Angka garis kemiskinan bulan Maret 2023 dilaporkan mencapai Rp 550.458/kapita/bulan dengan garis kemiskinan makanan mencapai Rp 408.522 (74,21 persen) dan garis kemiskinan non makanan mencapai Rp 141.936 (25,79 persen). Selain itu, garis kemiskinan per rumah tangga dilihat dari pendapatan rata-rata mencapai Rp 2.592.657/bulan.

Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2013-2023 rata-rata persentase penduduk miskin tertinggi dialami Pulau Maluku-Papua dengan angka mencapai 19,04%, kemudian disusul Pulau Bali-Nusa Tenggara sebesar 13,66%, Pulau Sulawesi sebesar 11,83%, Pulau Sumatera sebesar 10,09%, dan Pulau dengan

persentase penduduk miskin terendah yaitu Pulau Kalimantan sebesar 6,12% dan Pulau Jawa sebesar 9,14%.

Salah satu pulau yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Pulau Sumatera, selain karena merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan luas sekitar 473.481 km², pada tahun 2023 Pulau Sumatera masuk dalam daftar pulau-pulau terpadat di dunia yang menduduki posisi peringkat lima dengan jumlah penduduk sebesar 59 juta jiwa (Kompas.com, 2024). Jumlah penduduk miskin di Sumatera tahun 2023 sebesar 5.671.000 jiwa, bahkan tiga provinsi di Pulau Sumatera masuk dalam sepuluh provinsi dengan Tingkat Kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu Provinsi Aceh, Bengkulu dan Sumatera Selatan (BPS, 2023).



Sumber: BPS, diolah

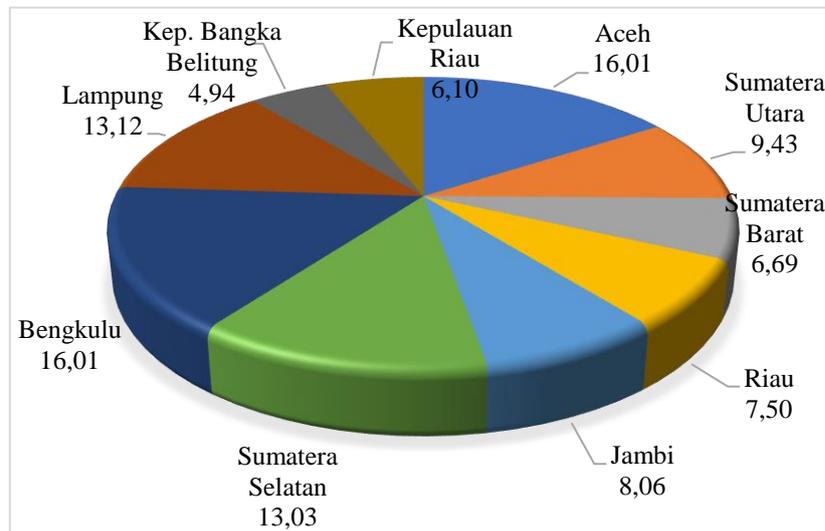
Gambar 1 Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia diduduki oleh provinsi-provinsi di Kawasan Timur Indonesia seperti Papua posisi pertama dengan persentase kemiskinan sebesar 26,03%, Papua Barat posisi kedua sebesar 20,49%, Nusa Tenggara Timur posisi ke tiga sebesar 19,96%, Maluku posisi ke empat sebesar 16,42%, Gorontalo posisi ke lima sebesar 15,15%, Provinsi Nusa Tenggara Barat posisi kedelapan sebesar 13,85%, dan Provinsi Sulawesi Tengah posisi ke sembilan sebesar 12,41%. Sementara

itu, posisi ke-enam, ke-tujuh, dan ke-sepuluh diduduki oleh provinsi-provinsi di Sumatera seperti Provinsi Aceh menduduki posisi ke-enam dengan persentase kemiskinan sebesar 14,45%, kemudian Provinsi Bengkulu menduduki posisi ke-tujuh dengan persentase kemiskinan sebesar 14,04% serta Provinsi Sumatera Selatan yang menduduki posisi ke-sepuluh provinsi dengan Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia sebesar 11,78%. Melihat tingkat kemiskinan yang masih tinggi, diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat dalam pengentasan kemiskinan pada sepuluh provinsi dengan Tingkat kemiskinan tertinggi ini terutama provinsi- provinsi di Sumatera.

Pengentasan kemiskinan tidaklah menjadi suatu permasalahan yang mudah, kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan sudah dilakukan pemerintah namun belum menunjukkan hasil yang efektif. Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi, sehingga membutuhkan kebijakan dan intervensi program yang juga bersifat multidimensi agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan membebaskan masyarakat dari garis kemiskinan. Akibatnya, kerangka pertumbuhan ekonomi akan berbeda-beda tergantung pada lokasi geografis, karakteristik, kekayaan alam, sarana dan prasarana, serta tenaga kerja. Kebijakan harus seimbang mengingat kualitas kawasan yang prospektif dan membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk mengetahui potensi serta apasaja faktor yang berpengaruh dengan tingkat kemiskinan pada daerah tersebut. Dengan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di suatu daerah, maka pemerintah dapat menentukan dan membuat kebijakan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera periode 2013-2023, dapat diamati pada gambar 2 dibawah ini.

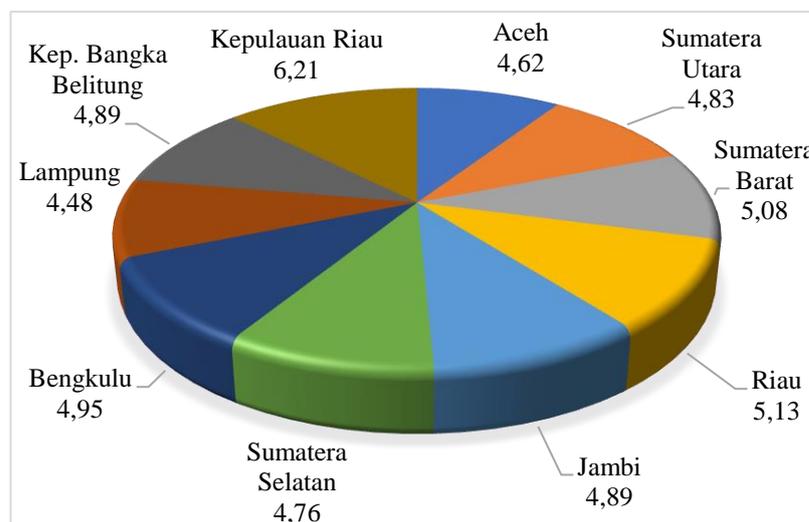


Sumber: BPS, diolah

Gambar 2 Rata-rata Tingkat Kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Berdasarkan Gambar 2 terdapat indikasi bahwa tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Sumatera dalam periode 2013-2023 memiliki nilai yang berfluktuatif, tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera berada di Provinsi Aceh dan Bengkulu dengan rata-rata nilai 16,01 persen, selanjutnya ada Provinsi Lampung memiliki rata-rata tingkat kemiskinan mencapai 13,12 persen dan Provinsi Sumatera Selatan dengan rata-rata tingkat kemiskinan 13,03 persen. Sedangkan provinsi dengan rata-rata tingkat kemiskinan terendah di Sumatera dalam kurun waktu 2013-2023 yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,94 persen. Kemiskinan menjadi permasalahan pembangunan disebabkan oleh efek negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dalam hal ini memperluas perbedaan penghasilan pada tiap masyarakat maupun perbedaan penghasilan tiap daerah. Hal ini terjadi pastinya disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat kemiskinan. Teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka dapat menjadi komponen yang memengaruhi tingkat kemiskinan disuatu daerah.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yakni tolok ukur yang bisa mendeskripsikan tingkat pembangunan teknologi di daerah. Angka indeks berkisar pada interval 0-10, dimana semakin besar angka indeks mengindikasikan kemampuan dan pencapaian pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di daerah semakin optimal. Kebalikannya, lebih kecil angka indeks mengindikasikan bahwa pembangunan teknologi di suatu daerah belum optimal. IP-TIK menjadi hal yang penting untuk mengukur tingkat pembangunan teknologi suatu wilayah dalam membandingkan antar waktu dan antar daerah. Rata-rata Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi (IP-TIK) dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

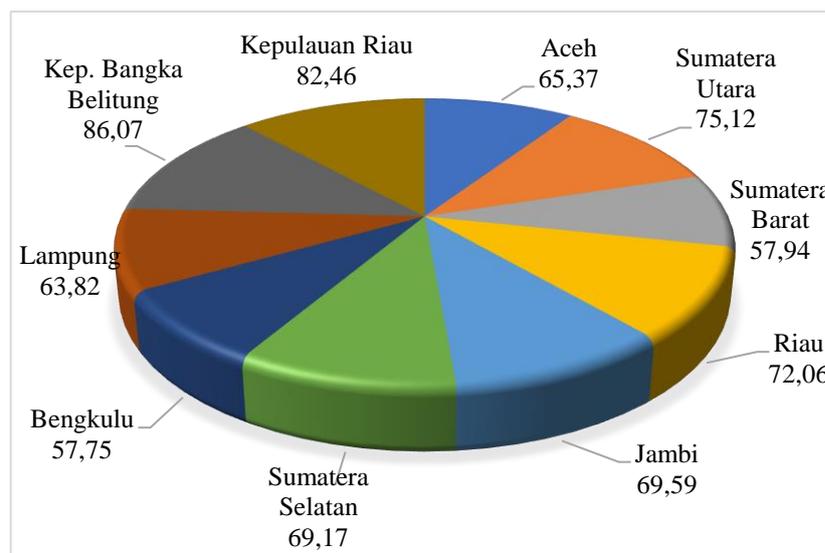


Sumber: BPS, diolah

Gambar 3 Rata-rata IP-TIK Provinsi-provinsi di Sumatera tahun 2013-2023

Dari Gambar 3 terlihat rata-rata Indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi Provinsi-provinsi di Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau menjadi provinsi rata-rata nilai IP-TIK tertinggi yaitu sebesar 6,21 di ikuti dengan Provinsi Riau sebesar 5,13 dan Sumatera Barat sebesar 5,08. Sementara itu, provinsi yang rata-rata IP-TIK terendah terjadi pada Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,48. Selanjutnya ada Provinsi Aceh yang memiliki rata-rata sebesar 4,62 dalam kurun waktu 2013-2023. Selain IP-TIK, faktor yang dapat mempengaruhi Tingkat kemiskinan yaitu Akses sanitasi layak.

Semakin baik pembangunan sanitasi yang dalam hal ini diukur berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, maka peluang masyarakat agar sehat menjadi lebih tinggi yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraannya. Sanitasi merupakan faktor penting yang mendasari kesehatan dasar bagi masyarakat. Untuk mencapai tingkat kesehatan yang tinggi diperlukan fasilitas kesehatan dan akses sanitasi yang baik. Individu dengan kesehatan yang baik menggambarkan tingkat kualitas manusia yang lebih tinggi karena memiliki rata-rata hidup lebih lama. Mutu manusia lebih baik akan meningkatkan produktivitas dan menerima penghasilan yang lebih tinggi, sehingga mengurangi persentase penduduk miskin. Rata-rata akses sanitasi layak Provinsi-provinsi di Sumatera dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

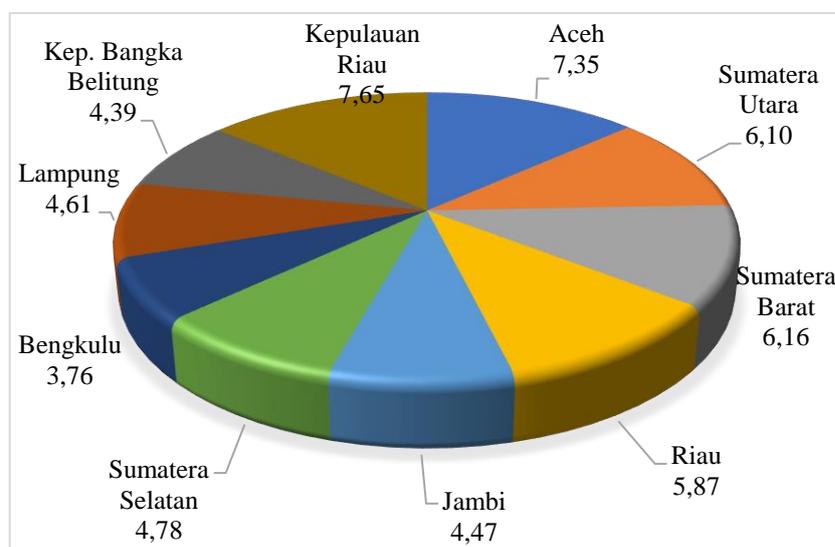


Sumber: BPS, diolah

Gambar 4 Rata-rata Akses Sanitasi Layak Provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Berdasarkan Gambar 4 Rata-rata terlihat bahwa Akses Sanitasi Layak Provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan keadaan yang bervariasi dalam interval sebelas tahun. Berdasarkan data tersebut Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi provinsi dengan rata-rata akses sanitasi layak tertinggi dalam kurun waktu 2013-2023 yaitu sebesar 86,07 persen. Selanjutnya diikuti Provinsi Kepulauan Riau sebesar 82,46 persen. Sedangkan provinsi dengan rata-rata akses sanitasi layak terendah berada di provinsi Bengkulu sebesar 57,75 persen, dan

Provinsi Sumatera Barat sebesar 57,94 persen dalam kurun waktu 2013-2023. Komponen lain yang bisa memengaruhi tingkat kemiskinan berikutnya yaitu tingkat pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, berusaha mencari dan bersedia untuk bekerja. Rata-rata tingkat pengangguran Provinsi-provinsi di Sumatera dapat diamati pada gambar 5 dibawah ini.



Sumber: BPS, diolah

Gambar 5 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023

Berdasarkan data pada Gambar 5 terlihat bahwa rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka dalam periode 2013-2023 menunjukkan angka yang bervariasi. Provinsi dengan rata-rata tingkat pengangguran terbuka tertinggi berada di Provinsi Kepulauan Riau yaitu mencapai 7,65 persen. Kemudian ada Provinsi Aceh sebesar 7,35 persen. Sementara itu, provinsi dengan rata-rata Tingkat pengangguran terbuka terendah pada Provinsi Bengkulu mencapai 3,76 persen. Selanjutnya ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata 4,39 persen, Jambi 4,47 persen, Lampung 4,61 persen, Sumatera Selatan 4,78 persen, Riau 5,87 persen, Sumatera Utara mencapai 6,10 persen dan Sumatera Barat mencapai 6,16 persen dalam kurun waktu 2013-2023.

Tujuan unggulan dari upaya pembangunan ekonomi selain mencapai pertumbuhan yang maksimal, perlu juga meliputi penghapusan ataupun pengurangan tingkat kemiskinan, perbedaan penghasilan, dan tingkat pengangguran (Todaro M. P., 2006). Oleh karena itu, fokus utama dalam Pembangunan yaitu pengentasan kemiskinan. Menurut (Todaro M. P., 2012) mengatakan kemiskinan pada negara berkembang dipengaruhi dari berbagai faktor, antara lain: (1) Geografis, jumlah populasi, dan tingkat pendapatan yang berbeda, (2) Sejarah, termasuk penjajahan yang dilakukan negara yang berbeda, (3) Kekayaan sumber daya alam serta mutu sumber daya manusia yang berbeda, (4) Peran sektor swasta dan pemerintah yang berbeda, (5) berbeda sistem industri, (6) tingkat kebergantungan terhadap stabilitas ekonomi dan politik dari negara lain yang berbeda, dan (7) distribusi kekuasaan, struktur politik serta lembaga dalam negeri yang beda. Kemiskinan terjadi karena terdapat beberapa daerah masih belum optimal teratasi. Terdapat beberapa sektor masih memerlukan peningkatan produktivitas, dan ada juga sejumlah penduduk yang tidak berpartisipasi pada proses pembangunan oleh karenanya tidak mencapai hasil yang optimal.

Menurut (Christiani & Nainupu, 2021) dalam penelitiannya, secara simultan akses internet, akses listrik mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019. Penelitian ini berbeda dengan (Kamilia, 2022) yang mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan TIK mempunyai pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2016-2020.

Penyebaran informasi pada era teknologi yang semakin maju ini diharapkan masyarakat dapat lebih baik dalam memanfaatkan berbagai alternatif alat komunikasi yang semakin beragam. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ditargetkan dapat berkontribusi mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan pada bidang informasi dan komunikasi selalu diperluas, tetapi belum merata sehingga timbul kesenjangan. Kesenjangan tersebut dapat menciptakan kemiskinan informasi apabila tidak diminimalisir dan dapat memunculkan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Menurut (Hariani & Ekaria, 2023) dalam penelitiannya menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Sanitasi Layak, internet berpengaruh langsung terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia tahun 2021. Hal ini juga diungkapkan oleh (Kamilia, 2022) bahwa Sanitasi mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia 2016-2020. Pengangguran menjadi satu diantara komponen kemiskinan yang terjadi pada masyarakat karena tidak adanya lapangan pekerjaan untuk memperoleh pendapatan guna memenuhi kebutuhan pokoknya. Kesempatan kerja yang tidak setara menghasilkan cukup banyak pengangguran dan keterbelakangan teknologi membuat lebih sulit untuk menciptakan peluang baru.

Berdasarkan permasalahan dan fakta yang sudah dijabarkan dilatar belakang, penelitian ini mencoba untuk menganalisis tingkat kemiskinan pada tingkat regional yaitu di Sumatera yang meliputi 10 Provinsi yang menjadi studi kasusnya sebagai pembeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya yang lebih memfokuskan di wilayah bagian timur. Penelitian di tingkat regional ini penting untuk dilakukan karena setiap daerah tentunya memiliki karakteristik serta pembangunannya sendiri. Dengan melihat perbedaan tingkat kemiskinan pada provinsi di Sumatera, maka dapat diidentifikasi juga berbagai faktor yang menjadi pengaruh tingkat penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Maka dari itu, Peneliti memiliki minat untuk mengkaji studi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi, Akses Sanitasi Layak, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera”**. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah serta pihak terkait untuk mengambil sebuah kebijakan pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena gap tahun 2013-2023, kemiskinan menjadi satu diantara isu yang mendapat fokus pengamatan serius pemerintah khususnya di negara-negara berkembang, misalnya Indonesia. Masyarakat yang berkehidupan miskin memiliki lebih sedikit kesempatan untuk menggunakan hak asasinya,

seperti akses terhadap pangan, sandang, dan papan. Seiring dengan tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang pertama menegaskan bahwa pemberantasan kemiskinan dalam segala manifestasinya sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam praktiknya, kemiskinan masih menjadi permasalahan nasional yang kompleks hingga saat ini. Pengentasan kemiskinan bukan permasalahan ringan, bermacam kebijakan menurunkan tingkat kemiskinan sudah diimplementasikan oleh pemerintah namun belum membuktikan hasil yang efektif. Beberapa faktor dianggap mempengaruhi tingkat kemiskinan diantaranya yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), akses sanitasi layak, dan tingkat pengangguran terbuka. IP-TIK berperan sebagai alat yang membuka akses informasi dan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, mencari pekerjaan, serta berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas. Akses sanitasi layak mencerminkan kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Disisi lain tingkat pengangguran yang tinggi yaitu salah satu akibat kurang tercapainya pembangunan di suatu negara yang disebabkan oleh jumlah angkatan kerja dan jumlah lapangan kerja yang tersedia belum merata. Sesuai dengan latar belakang yang sudah dipaparkan, pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Akses Sanitasi Layak, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023?
2. Bagaimana pengaruh variabel Teknologi Informasi dan Komunikasi, Akses Sanitasi Layak, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Akses Sanitasi Layak, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Tingkat Kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi, Akses Sanitasi Layak dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi-provinsi di Sumatera Tahun 2013-2023.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Diharapkan, penelitian ini bisa bermanfaat sebagai literatur bagi kalangan akademis yang menganalisis tentang teknologi informasi dan komunikasi, akses sanitasi layak, tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan provinsi-provinsi di Sumatera. Dan sebagai masukan bagi peneliti yang memiliki objek kajian yang serupa dalam ruang lingkup berbeda dengan mengubah penelitian ini sehingga hasil yang dikehendaki dapat lebih baik lagi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan, penelitian ini menjadi saran dan evaluasi dalam memilih alternatif kebijakan bagi pemerintah maupun pihak terkait untuk meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan akses sanitasi layak, mengurangi tingkat pengangguran agar tingkat kemiskinan di Sumatera turun.